

Koordinasi dan Konsultasi Kalapas Perempuan Tenggara Ke Ditjenpas Optimalkan BMN dan Sapras

Alfian Hidayat - TENGARONG.JURNALNASIONAL.CO.ID

Oct 31, 2024 - 13:12



Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu proses dalam pengelolaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah.

Pengelolaan tersebut tentunya dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pada hari Rabu (30/10/2024) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Triana Agustin beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dalam rangka Koordinasi dan Pelaporan terkait Pembangunan Tahap I Perluasan Lapas Perempuan Tenggarong.

Tiba pada pukul 13.00 WIB pada ruang kerja Sekretaris Ditjenpas, kedatangan Kalapas Perempuan Tenggarong beserta rombongan disambut hangat oleh Kepala Sekretaris Ditjenpas Bapak Supriyanto.

Dalam kunjungan tersebut, Triana Agustin melaporkan dan membahas terkait Peningkatan Tugas dan Fungsi serta melaporkan Pembangunan Tahap I yang sudah mencapai 67,3 % yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Selain itu, kalapas Perempuan Tenggarong berharap dengan adanya koordinasi dan konsultasi ini lebih mengoptimalkan pelayanan pada Lapas Perempuan Tenggarong.

“Terima kasih untuk Bapak Sedjitenpas atas sambutannya. Kami berharap melalui koordinasi ini, sarana dan prasarana terkait Pembangunan Perluasan Lapas Perempuan dapat terpenuhi sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi bisa berjalan dengan lancar serta mampu mewujudkan kinerja Kumham semakin PASTI” tutupnya.

Kegiatan Koordinasi ini didukung penuh oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan dan Kadivpas Endang Lintang. Kakanwil dan Kadivpas berharap dengan dilaksanakannya pembangunan perluasan Lapas Perempuan Tenggarong dapat meningkatkan pelayanan bagi Warga Binaan dan Masyarakat.

